

**RENCANA STRATEGIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)**



**BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2013 - 2018**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah perlu perencanaan daerah yang matang. Perencanaan daerah diharapkan mampu memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan stekholder dan legislatif dalam proses perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan dari semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara optimal.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai kewajiban membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2013- 2018. Selain itu juga bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menetapkan standarisasi penanggulangan bencana, menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun, memantau dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang serta melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya untuk memenuhi tugas dan fungsi yang diembannya diperlukan dana guna tercapainya sasaran di bidang kebencanaan dan prabencana secara efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran.

Guna merealisasikan tercapainya tujuan dan cita-cita tersebut diatas, maka diformulasikan dokumen dimana didalamnya dimuat rincian kegiatan dan indikator kinerja, tolok ukur yang lebih detail, jelas dan transparan dimana Rentra ini bersifat fleksibel dan dapat menampung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bahan referensi maupun kegiatan dalam pelaksanaan tugas melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

B. Maksud dan Tujuan

Rentra SKPD disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tahun depan. Selanjutnya Rentra ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang ditanganinya.

Tujuan penyusunan Rentra adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi SKPD dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya.
4. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran.
5. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan yang terukur selama 5 (lima) tahun kedepan

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

8. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

D. Hubungan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung juga merupakan rencana tindak lanjut / implementasi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013- 2018 yang memuat pokok-pokok pelaksanaan RPJMD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam kerangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Selanjutnya dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 inilah yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada setiap tahunnya.

E. Sistematika Penyusunan

Penulisan naskah Renstra ini disusun dalam sistematika yang logis dan jelas, dengan maksud agar setiap apa yang ditulis dalam dokumen Renstra ini dapat dipahami dan dimengerti oleh segenap lembaga dan komponen masyarakat yang berkompeten.

Adapun sistematika disusun sebagai berikut :

- BAB I** **PENDAHULUAN**
Berisi tentang latar belakang perlunya Renstra serta dasar hukum yang mendasar perlunya perencanaan strategis, visi dan misi yang menggambarkan apa dan bagaimana langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan serta hubungan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- BAB II** **TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**
Berisi tentang gambaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, struktur organisasinya, profil kepegawaian dan sarana prasarana dan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan alternatif kebijakan dan program yang akan dilaksanakan.
- BAB III** **GAMBARAN UMUM/PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**
Berisi kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada saat ini juga memuat permasalahan yang dihadapi untuk 5 (lima) tahun kedepan
- BAB IV** **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Berisi tentang Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Temanggung. Serta memuat Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang merupakan rumusan umum yang dilaksanakan untuk mencapai Visi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
- BAB V** **STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**
Berisi cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Juga memuat program dan kegiatan untuk mencapai tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB VI** **TARGET KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Berisi uraian indikator kinerja, target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VII

PENUTUP

Berisi tentang kata akhir dari seluruh rangkaian dokumen perencanaan serta harap-harapan dilaksanakannya Perencanaan Strategis ini secara konsisten.

Lampiran :

1. Matriks Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun dan Target Kinerjanya
2. Matriks Program 5 (lima) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
3. Matriks Program Tahunan SKPD
(Lampiran ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen induk Renstra).

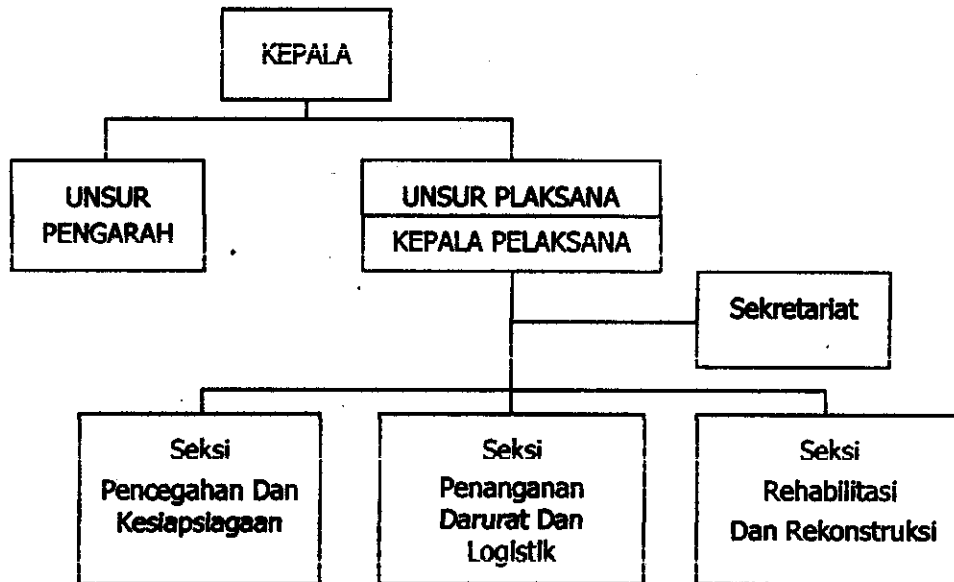
BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum SKPD

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Temanggung mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Pelaksana
- 2) Sekretariat
- 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 4) Seksi Penanganan Darurat dan logistik
- 5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang dibicarakan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di atas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 96 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga setiap pejabat di unit kerja masing-masing mampu melaksanakan sesuai uraian tugasnya sebagai berikut:

a. Uraian Tugas Kepala Pelaksana :

- 1 Menetapkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai kebijakan pembangunan lima tahunan dibidang penanggulangan bencana.
- 2 Merumuskan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 3 Membina, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 5 Menetapkan Renja SKPD.
- 6 Menetapkan RPJMD.
- 7 Merumuskan Raperda dan Raperbup penanggulangan bencana.
- 8 Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 9 Menyusun laporan program/kegiatan dan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
- 10 Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai ketentuan.
- 11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan.

b. Uraian Tugas Kepala Sekretariat :

- 1 Menyusun rencana program/kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja.
- 2 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3 Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis dibidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- 4 Menyiapkan bahan penyusunan RPJMD untuk perencanaan daerah lima tahunan.
- 5 Menyiapkan bahan penyusunan Renstra untuk perencanaan SKPD lima tahunan.
- 6 Menyiapkan bahan penyusunan Renja/bahan Musrenbang untuk perencanaan SKPD tahunan.
- 7 Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan RKA/RKA Perubahan/DPA/DPA Perubahan untuk mengajukan anggaran kegiatan.
- 8 Melaksanakan pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.
- 9 Memantau dan mengendalikan kegiatan di lingkup Sekretariat agar sesuai rencana.
- 10 Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan Lakip dan Penetapan Kinerja.
- 11 Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ.
- 12 Menyiapkan dan mengumpulkan bahan standarisasi biaya sebagai pedoman penyusunan RKA.
- 13 Menyiapkan dan menyusun bahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 14 Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 15 Menyusun laporan program/kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
- 16 Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai ketentuan.
- 17 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan.

c. Uraian Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- 1 Menyusun rencana program/kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dan acuan kerja.
- 2 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3 Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis dibidang penanggulangan bencana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4 Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana, pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 5 Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 6 Melaksanakan pemantauan monitoring dan evaluasi serta menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 7 Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 8 Menyusun laporan program/kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
- 9 Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai ketentuan.
- 10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan.

d. Uraian Tugas Kepala Seksi Penanganan Darurat dan Logistik :

- 1 Menyusun rencana program/kegiatan Seksi Penanganan Darurat dan Logistik sebagai pedoman dan acuan kerja.
- 2 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3 Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis dibidang penanggulangan bencana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4 Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta pemberian dukungan logistik dan peralatan.
- 5 Melaksanakan hubungan kerja dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat siaga darurat darurat, tanggap darurat.
- 6 Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik dan peralatan.
- 7 Memantau, mengevaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggpenanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta pemberian dukungan logistik dan peralatan.
- 8 Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 9 Menyusun laporan program/kegiatan Seksi Penanganan Darurat dan Logistik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
- 10 Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai ketentuan.
- 11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan.

e. Uraian Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

- 1 Menyusun rencana program/kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dan acuan kerja.
- 2 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3 Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis dibidang penanggulangan bencana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4 Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- 5 Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- 6 Memantau, mengevaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulungan bencana pada pasca bencana.
- 7 Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 8 Menyusun laporan program/kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
- 9 Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai ketentuan.
- 10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan.

B. Kepegawaian

a. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pendidikan

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menurut pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|----|------------|----------------|------------|
| 1. | S 2 | 2 | |
| 2. | S 1 | 8 | |
| 3. | D III | - | |
| 4. | SMA/SMK | 4 | |
| 5. | SMP | - | |
| 6. | SD | 2 | |
| | Jumlah | 16 | |

b. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menurut Golongan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

| No | Golongan/Ruang | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|-----|--------------------------------|----------------|------------|
| 1. | Pembina Utama Muda (IV/c) | - | |
| 2. | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 | |
| 3. | Pembina (IV/ a) | - | |
| 4. | Penata Tingkat I (III/d) | 2 | |
| 5. | Penata (III/c) | 1 | |
| 6. | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 1 | |
| 7. | Penata Muda (III/ a) | 2 | |
| 8. | Pengatur Tingkat I (II/d) | - | |
| 9. | Pengatur (II/c) | 1 | |
| 10. | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | - | |
| 11. | Pengatur Muda (II/a) | 4 | |
| 12. | Juru (I/b) | 1 | |
| | Jumlah | 16 | |

C. Kondisi sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana

| No | Jenis Sarana/Prasarana | Jumlah | Keterangan |
|-----|----------------------------|---------|------------|
| 1. | Gedung Perkantoran | 1 unit | APBD |
| 2. | Gedung SAR | 1 unit | APBD |
| 3. | Mobil Rescue Komando | 1 unit | BNPB |
| 4. | Motor Trail | 2 unit | BNPB |
| 5. | Transcarver/Transmitter HF | 1 unit | BNPB |
| 6. | Power suplay | 1 unit | BNPB |
| 7. | Antena VHF | 1 buah | BNPB |
| 8. | HT | 3 buah | BNPB |
| 9. | Genset | 4 buah | BNPB |
| 10. | Tenda pleton | 4 buah | BNPB |
| 11. | Tenda regu | 4 buah | BNPB |
| 12. | Tenda posko | 1 buah | BNPB |
| 13. | Tenda keluarga | 5 buah | BNPB |
| 14. | Machine saw | 1 buah | BNPB |
| 15. | Helm pengaman | 40 buah | BNPB |
| 16. | Velt bed alumunium | 19 buah | BNPB |
| 17. | Velt bed besi | 9 buah | BNPB |
| 18. | Tas ransel besar | 2 buah | BNPB |
| 19. | Tali carmantel statis | 2 buah | BNPB |
| 20. | Tali carmantel dinamis | 1 buah | BNPB |
| 21. | Tali bagu | 1 buah | BNPB |
| 22. | Carabiner | 1 buah | BNPB |
| 23. | Vetbed alumunium | 10 buah | BNPB |
| 24. | RIG | 1 buah | BNPB |
| 25. | SSB | 1 buah | BNPB |
| 26. | Lampu senter | 1 buah | BNPB |
| 27. | Water Treatmen Portable | 1 buah | BNPB |
| 28. | Motor Honda Mega Pro | 1 Unit | APBD |
| 29. | Mobil Rescue Komando | 1 Unit | APBD |
| 30. | Aimari kayu 2 pintu | 3 buah | APBD |
| 31. | Kursi Rapat | 20 buah | APBD |
| 32. | Rak logistik | 2 buah | APBD |
| 33. | Meja kursi tamu | 1 set | APBD |
| 34. | Kamera Digital | 1 buah | APBD |
| 35. | Kursi Eselon 3 hitam | 1 buah | APBD |

| | | | |
|-----|----------------------------|----------|------|
| 36. | Kursi kerja eselon 4 hitam | 5 buah | APBD |
| 37. | Kursi kerja staf | 5 buah | APBD |
| 38. | Tandon air plastik | 24 buah | APBN |
| 39. | Jerigen plastik | 400 buah | APBN |

BAB III

GAMBARAN UMUM/PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Peluang dan Permasalahan Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB Pusat;
- Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pos belanja tidak terduga APBD Kabupaten Temanggung;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penanggulangan bencana;
- Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

b. Kelemahan

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Belum memadainya Standard Operational Procedure (SOP) penanganan bencana di Wilayah Kabupaten Temanggung
- Belum memadainya kinerja dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi lintas sektoral dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya pengurangan risiko bencana;
- Adanya sinkronisasi kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun wilayah)
- Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM dalam upaya penanggulangan bencana.

b. Ancaman

- Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;

- Perilaku masyarakat yang kurang terkendali dalam hal pemamfaatan ruang dan lahan;
- Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

B. Isu-Isu Strategis

Isu strategis dan masalah mendesak Penanggulangan Bencana Daerah yang perlu mendapat penanganan pada tahun mendatang antara lain adalah :

1. Pencegahan dan kesiapsiagaan
 - b. Terlaksananya kesiapsiagaan/mitigasi bencana sebagai upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), gladi posko, gladi lapang dan sosialisasi.
 - c. Replikasi/Pengembangan program desa tangguh.
 - d. Pengadaan Peta Rawan Bencana.
 - e. Meningkatkan SDM Mitra BPBD dalam rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
2. Penanganan Penanggulangan Bencana alam.
 - a. Tertanggulangnya korban bencana dan pengungsi.
 - b. Tersedianya sarana tanggap darurat bencana.
 - c. Terpenuhinya kebutuhan logistik bagi korban bencana.
 - d. Terlaksananya pemberian bantuan langsung masyarakat korban bencana alam.
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Terbangunnya sarana dan prasarana pasca bencana.

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tercermin dalam pencapaian yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan dapat dilihat dari penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada tahapan yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung akan melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung yang diharapkan akan lebih terarah sesuai dengan prinsip-prinsip penanggulangan bencana yaitu :

- a. cepat, tepat dan prioritas;
- b. koordinasi dan keterpaduan;
- c. berdaya guna dan berhasil guna;

- d. transparansi dan akuntabilitas;
- e. Kemitraan;
- f. berkeadilan gender;
- g. nondiskriminatif; dan
- h. nonproletisi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Visi

Penanggulangan Bencana Secara Terpadu, Cepat dan Tepat Sasaran Menuju Masyarakat Kabupaten Temanggung yang Aman, Nyaman dan Sejahtera.

2. Misi

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan misi. Adapun Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur
- b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam Penanganan Bencana
- c. Meningkatkan pemenuhan hak dasar masyarakat korban bencana
- d. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- e. Melestarikan tata kelola lingkungan dalam penanggulangan bencana guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

B. Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD

Tujuan pelaksanaan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

- a. Tercapainya sasaran Pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana secara efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran.
- b. Meminimalisir resiko akibat bencana alam dan menyelamatkan yang masih hidup (*save more live*).

Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur,
- b. Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terpadu,
- c. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana,
- d. Meningkatnya kesadaran pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

BAB V

STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

A. Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan upaya Penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Strategi yang dilaksanakan:

- 1) Meningkatkan SDM serta sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana ;
- 2) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana ;
- 3) Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana ;

Kebijakan yang dilaksanakan

- 1) Mengembangkan SDM berbasis kompetensi ;
- 2) Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan ;
- 3) Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko bencana tinggi ;
- 4) Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.

B. Program dan Kegiatan Prioritas

Tindak lanjut dari Isu strategis Bidang Penanggulangan Bencana Daerah 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu diprioritaskan program dan kegiatan guna menjawab permasalahan Bencana alam berkait dengan isu-isu strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung memprioritaskan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - k. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - l. Jasa Pelayanan Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- a. Diklat dan Simulasi Penanganan Bencana
 - b. Replikasi/Pengembangan program desa tangguh
 - c. Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana
- 4) Program Tanggap Darurat dan Logistik
- a. Penanganan Bencana Alam
- 5) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca bencana

Demikian prioritas program dan kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan, untuk lebih jelas dan rincinya dapat dilihat pada lampiran.

BAB VII

TARGET KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifikasi secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan /atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung periode 2013-2018 dengan program dan kegiatan 5 (lima) tahun berupa :

1. Hasil penanggulangan bencana lebih efektif dan efisien demi terciptanya Kabupaten Temanggung yang lebih aman dan nyaman;
2. Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
3. Hasil-hasil pelaksanaan tugas lainnya (penugasan khusus).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2013-2018 yang menjadi tanggung jawab semua SKPD, sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Pengukuran keberhasilan RPJMD 2013-2018 dapat diukur dari Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMD 2013-2018.

Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan program dan kegiatannya mempunyai indikator kinerja berupa :

1. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;
2. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap;
3. Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Daerah Rawan Bencana;
4. Persentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana dengan baik.

B. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Temanggung yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya dan kearifan lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dinilai dapat berlangsung baik.

Bukti keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai untuk prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;

- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan kemampuan daerah;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
- d. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung disusun sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pembangunan bidang Penanggulangan Bencana Daerah untuk 5 (lima) Tahun kedepan dengan perencanaan yang lebih terarah dan dapat meminimalisir kesalahan dalam perencanaan.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. AGUS WIDODO
Pembina Tingkat I
NIP. 19610808 199103 1 006

INDIKATOR URUSAN SOSIAL

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| INDIKATOR | | DATA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | | | | | |
| | | Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | | | | | |
| | | Persentase(%) | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 2 | Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Jumlah korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun | | | | | |
| | | Jumlah korban bencana skala kab/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun | | | | | |
| | | Persentase (%) | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 4 | Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Rawan Bencana dalam 1 (satu) tahun | Jumlah Masyarakat terlatih dalam bidang penanggulangan bencana yang meningkatkan ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana (orang) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Jumlah relawan terlatih dalam bidang penanggulangan bencana yang meningkatkan ketangguhan masyarakat di daerah wrawan bencana (orang) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Prosentase (%) Jumlah desa tangguh bencana di daerah rawan bencana (dr 44 desa rawan bencana) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

| INDIKATOR | | DATA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|--|------|------|------|------|------|
| 2 | Persentase (%) terbantunya mayarakat terdampak bencana yang menyebabkan kerugian non fisik melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dalam 1 (satu) tahun | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan pemulihan kerugian non fisik akibat bencana dalam 1 (satu) tahun melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana | | | | | |
| | | Jumlah masyarakat yang seharusnya menerima bantuan pemulihan kerugian non fisik akibat bencana dalam 1 (satu) tahun melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana | | | | | |
| | | Persentase (%) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |

INDIKATOR URUSAN PRASWIL

| INDIKATOR | | DATA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase (%) terlangarnya kerusakan fisik akibat bencana dengan baik melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dalam 1 (satu) tahun | Jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 (satu) tahun yang terbangun kembali melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana | | | | | |
| | | Jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya terbangun kembali melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana | | | | | |
| | | Persentase (%) | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |

Temanggung, Juni 2013

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Drs. AGUS WIDODO

Pembina Tingkat I

NIP. 19610808 199103 1 006

DATA AWAL RPJMD 2013-2018

BKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDIKATOR URUSAN SOSIAL

| INDIKATOR | JENIS DATA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|---|------|------|------|-------|------|
| 1 | Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 0 | 0 | 0 | 117 | 44 |
| | Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 0 | 0 | 0 | 154 | 50 |
| | Persentase (%) | | | | 75,97 | 88 |
| 2 | Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| | Jumlah korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| | Persentase (%) | | | | 100 | 100 |
| 3 | Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Rawan Bencana dalam 1 (satu) tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Jumlah Masyarakat terlatih dalam bidang penanggulangan bencana yang meningkatkan ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana (orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Jumlah relawan terlatih dalam bidang penanggulangan bencana yang meningkatkan ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana (orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Persentase (%) Jumlah desa tangguh bencana di daerah rawan bencana (di 44 desa rawan bencana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 |

| INDIKATOR | | DATA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|--|---|------|------|------|------|------|
| 4 | Persentase (%) terbantunya masyarakat terdampak bencana yang menyebabkan kerugian non fisik melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dalam 1 (satu) tahun | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan pemulihan kerugian non fisik akibat bencana dalam 1 (satu) tahun melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Jumlah masyarakat yang seharusnya menerima bantuan pemulihan kerugian non fisik akibat bencana dalam 1 (satu) tahun melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Persentase (%) | | | | | |

INDIKATOR URUSAN PRASWIL

| INDIKATOR | | DATA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|--|--|------|------|------|-------|------|
| 1 | Persentase (%) tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana dengan baik melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dalam 1 (satu) tahun | Jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 (satu) tahun yang terbangun kembali melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| | | Jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya terbangun kembali melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| | | Persentase (%) | | | | 45,16 | 0,00 |

Kepala Bidang/Seksi/Kasubag :

| | Jabatan>Nama | Tanda Tangan |
|----|---|--------------|
| 1. | Kepala Sekretariat DONITA RUFYATI, S.Sos., M.Si | 1 |
| 2. | Kasi Penanganan Darurat & Logistik EKO SUPRAPTO, SH | 2 |
| 3. | Kasi Pencegahan & Kesiapsiagaan G. WALNGADI, S.Sos | 3 |
| 4. | Kasi Rehabilitasi & Rekonstruksi EDY MURJANTO, ST | 4 |

Temanggung, Juni 2013

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Drs. AGUS WIDODO

Pembina Tingkat I

NIP. 19610808 199103 1 006

LAMPIRAN RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD TAHUN 2014 - 2018

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2012 | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| | | | | | | 2013 (Sesuai APBD 2013) | | 2014 (sesuai renja SKPD 2014) | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | | | | Prediksal Capaian | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | A BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Belanja Bantuan Sosial | output: Terbutuhnya korban bencana di seluruh wilayah Kabupaten Tembung outcome: berkurangnya beban para korban bencana di seluruh wilayah Kabupaten | 123.500.000 | - | 150.000.000 | - | 200.000.000 | 200.000.000 | - | 200.000.000 | - | 200.000.000 | - | 200.000.000 | - | |
| | | | B BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a. Penyusunan Protip Penanggulangan Bencana | output: Terlaksananya PB dengan sistem komando terpadu dengan pedoman atau tersedianya SOP untuk masing-masing kategori bencana | | 100% | 100% | 9.020.000 | 100% | 25.000.000 | | | | | | | | |
| | | | b. Diklat dan Simulasi Penanganan Bencana | output: Terlaksananya Diklat dan Simulasi PB Meningkatkan Kemampuan masyarakat terlatih di/r PB | | 100% | 100% | 97.355.000 | 100% | 125.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 |
| | | | c. Rintisan Desa Tangguh Bencana | output: Terlaksananya Rintisari Desa Tangguh Bencana Terbutuhnya 1 Desa tangguh bencana | | 100% | 100% | 28.875.000 | | | | | | | | | | |
| | | | d. Pengembangan Desa Tangguh Bencana | output: Terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana Terbutuhnya desa tangguh bencana di 5 desa rawan bencana | | | | | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 |
| | | | e. Penyusunan Database Rawan Bencana | output: Terlaksananya kesiapsiagaan/mitigasi sebagai upaya PRB | | 100% | 100% | 35.204.750 | 100% | 200.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 |
| | | | f. Kesiapsiagaan bencana/mitigasi bencana | output: Terlaksananya kesiapsiagaan / mitigasi sebagai upaya PRB | 53.046.500 | 100% | 100% | 40.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|----|--|--|---|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | outcome | Terpentingnya dan terhindarnya masyarakat di daerah rawan bencana dari ancaman risiko bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Program Tanggap darurat dan Logistik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a. | Penanganan Bencana Alam | Terlaksananya penanganan Bencana, pengadaan logistik dan peralatan SAR dan operasional SAR serta terlaksananya penyediaan air bersih dan droppng air | Terlaksananya Terseleksiannya korban bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana | 346.567.800 | 12 bulan | 474.765.000 | 12 bulan | 525.000.000 | 12 bulan | 550.000.000 | 12 bulan | 600.000.000 | 12 bulan | 600.000.000 | 12 bulan |
| | | | b. | Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas Fasmifacos pada masa tanggap darurat. | Terlaksananya Penanggulangan darurat bencana Terbangunnya Fasmifacos akibat bencana pada masa tanggap darurat | | | | | 2.000.000.000 | 12 bulan | 2.000.000.000 | 12 bulan | 2.000.000.000 | 12 bulan | 2.000.000.000 | 12 bulan | |
| | | | c. | Pendampingan Relokasi Rumah Warga Akibat bencana | Terlaksananya Relokasi Rumah Warga Korban Bencana | | 75.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a. | Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana | Terlaksananya monitoring Pasca Bencana | | | 19.765.000 | 12 bulan | 20.000.000 | 12 bulan | 22.500.000 | 12 bulan | 25.000.000 | 12 bulan | 25.000.000 | 12 bulan | |
| | | | b. | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Terlaksananya program RR pasca bencana | | 62.807.500 | 100% | 49.765.500 | 100% | 600.000.000 | 100% | 700.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% |

| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|---|-------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 1. Rapat-rapat koordinator dan koordinasi dalam daerah | 15.980.000 | 100% | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 16.000.000 | 100% |
| | 2. Jasa Pelayanan pemerintahan | 9.833.000 | 100% | 100% | 16.000.000 | 100% | 21.000.000 | 100% | 23.500.000 | 100% | 26.000.000 | 100% | 28.500.000 | 100% |
| | 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | 100% | 100% | 20.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% |
| | b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 60.287.500 | 100% | 100% | 5.000.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% |
| | c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 16.250.000 | 100% | 75% | 25.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% |
| | d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | | 100% | 100% | 5.000.000 | 100% | 7.500.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 12.500.000 | 100% | 15.000.000 | 100% |
| | e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang bejana | | 100% | 100% | 15.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% |
| | f. Pengadaan kendaraan dinas / operasional | 346.334.000 | | | | | | | | | | | | |
| | g. Pengadaan Mebelur | 33.700.000 | | | | | 50.000.000 | | | | | | | |

| 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengadaan pakelan dinas beserta perlengkapan | output | Terpenuhiya seragam dinas | 100% | 7.500.000 | 100% | 7.500.000 | 100% | 7.500.000 | 100% | 7.500.000 | 100% |
| | | outcome | Meningkatnya disiplin pegawai | | | | | | | | | |
| b | Pengadaan Pakelan Khusus Hart - hari tertentu | output | Terpenuhiya Kabulahan Seragam Dinas | | 4.160.000 | | | | | | | |
| | | outcome | Meningkatnya Disiplin Pegawai | | | | | | | | | |
| c | Penggiatan SDM Aparatur Penanganan Bencana | output | Terlaksananya aparatur penanganan bencana sebagai T m Reaksi Cepat | 100% | 11.575.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 17.500.000 | 100% |
| | | outcome | Meningkatnya SDM aparatur dalam penanganan Bencana sebagai T m Reaksi | | | | | | | | | |

Temanggung, Juni 2013

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DR. AGUS WICAKO

Pembina Tingkat I
NIP. 19610808 1991 03 1 006

| Nama Pejabat Eselon (Satu Tingkat di Bawah Kepala SKPD) | Paraf |
|--|-------|
| 1. DOKITA RUFYATI, S.Sos., M.Si (Kepala Sekretariat) | 1 |
| 2. EKO SUPRAPTO, SH (Kasi Penanganan Darurat & Logistik) | 2 |
| 3. G. WALINGADI, S.Sos (Kasi Pencegahan & Kesiapsiagaan) | 3 |
| 4. EDY MURJANTO, ST (Kasi Rehabilitasi & Rekonstruksi) | 4 |